

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya adalah anggaran. Dilingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah suatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan diperbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan revormasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada sistem anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintah pada daerah tersebut, sebagai sektor publik pemerintah daerah harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, termasuk pada

pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada dan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.

Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena pada dasarnya laporan keuangan daerah adalah bagian dari sistem keuangan Negara. yang setiap tahunnya tidak selamanya anggaran yang direalisasikan mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Sebagaimana penelitian tenda M.V.S., et al. (2014:638) menemukan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak terjadi penurunan dan kenaikan yang signifikan, khususnya pada belanja bantuan sosial, belanja hibah, infrastruktur, jalan dan imigrasi. Terjadi surplus karena anggaran yang diterima lebih besar dari pada anggaran realisasi. Sebaiknya kepala daerah meningkatkan dari realisasi anggaran belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang dikelolanya (Rusdi, 2018).

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan

bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Assidiqi, 2016).

Menilai penilaian kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal atau pembangunan (Sinambela & Pohan, 2016)

Pergantian pemerintah dari orde baru ke orde reformasi membawa perubahan bagi pemerintahan Indonesia. Dengan adanya perubahan tersebut maka dituntut untuk dilaksanakannya otonomi daerah. Halim (2007:1) menyatakan otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pemerintah daerah ditetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan atas tugas pembantuan. Pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah. Pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan kinerja pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama isi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran (Sugeha, Karamoy, & Pusung, 2014).

Adapun data awal realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang tahun 2017-2021 pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kupang Tahun 2017-2021

| Tahun | PAD | Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) | Belanja Daerah |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|
| 2017 | 119.098.060.635 | 1.021.945.698.219 | 1.220.116.670.345 |
| 2018 | 66.182.995.394 | 961.319.841.490 | 1.221.688.581.122 |
| 2019 | 62.047.535.548 | 949.294.954.609 | 1.211.863.528.921 |
| 2020 | 65.952.353.499 | 852.263.771.208 | 1.149.687.557.091 |

| | | | |
|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2021 | 74.342.549.538 | 839.045.848.924 | 1.185.890.563.525 |
|------|----------------|-----------------|-------------------|

Sumber : BPKAD-data diolah, 2023

Berdasarkan table 1.1 di atas, di ketahui bahwa realisasi anggaran Kabupaten Kupang posisi pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dimana pada 2017 PAD memberikan kontribusi sebesar Rp.119.098.060.635 terhadap pendapatan daerah, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi sebesar Rp.66.182.995.394 terhadap Pendapatan Daerah, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp.62.047.535.548 namun pada dana perimbangan mengalami kenaikan terhadap Pendapatan Daerah dan Pada tahun 2020-2021 PAD kembali meningkat sehingga terjadi penurunan pada kontribusi dana perimbangan Pada pendapatan daerah. Selanjutnya ditinjau dari aspek belanja daerah dari tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami penurunan dan kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah juga setiap tahun menurun. Artinya bahwa belanja daerah Kabupaten Kupang masih di biyai melalui dana perimbangan dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang masih belum menutupi belanja daerahnya.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Marizka (2010). “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja realisasi pengelolaan APBD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan

pemerintah kota Medan sudah cukup baik. Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama menganalisis kinerja APBD. Perbedaannya adalah pada objek penelitian.

Penelitian lain dilakukan oleh Nurhayati (2008). “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bitung”. Menyimpulkan bahwa pemerintah kota Bitung memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam pembangunan daerah itu sendiri. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah agar keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menggunakan beberapa rasio dalam menganalisis APBD yang ada di pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, hanya memakai selisih dan hanya mengukur APBD dari segi belanja.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian ini berjudul: Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kantor badan pengelolaan keuangan aset daerah kabupaten kupang periode 2017-2021

1.3 Persoalan Penelitian

1. Bagaimana target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dilihat dari analisis varians pendapatan?
2. Bagaimana target dan realisasi pendapatan pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan?
3. Bagaimana target dan realisasi belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Kupang dilihat dari analisis varians belanja?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui Target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dilihat dari analisis varians pendapatan.
- b) Untuk mengetahui target dan realisasi pendapatan pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan.
- c) Untuk mengetahui target dan realisasi belanja daerah pemerintah daerah kabupaten kupang dilihat dari analisis varians belanja.

1.4.2 Manfaat penelitian

- a. Manfaat akademik
 1. Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi fakultas ekonomi khususnya jalur minat akuntansi sektor publik dalam rangka menambah wawasan berpikir khususnya bagi mahasiswa.
 2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama serta dapat menjadi

tambahan referensi sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi terutama terkait analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.